

---

## **PENYELENGGARAAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**Moh Zulfie Satria, Monalisa & Septa Juliana**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. JL.Kaharuddin Nasution No 113 perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284

*Email: Monalisafisipoluir@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan inovasi dan hambatan/kendala Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan Masyarakat Kecamatan Tualang. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga sampel penelitian ini ditetapkan berjumlah 51 orang. Pengambilan data dikumpulkan dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian dikelompokkan dan diolah secara kuantitatif. Data tersebut dipresentasikan dan dijelaskan serta dianalisa secara deskriptif guna mendapatkan hasil penelitian, lalu dapat ditarik kesimpulan. Secara keseluruhan penyelenggaraan inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada pada kategori cukup terlaksana. Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah melakukan inovasi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun, adanya kebaruan dan keunikan dalam pengelolaan sampah dengan cara menggandeng masyarakat, melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dan kegiatan dibiayai oleh APBD dari Kabupaten Siak, kemudian memberi dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan demikian inovasi pengelolaan sampah berada pada kategori cukup terlaksana. Terdapat beberapa hambatan dalam inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang yakni tingkat penyebaran penduduk, partisipasi, pembinaan, penyuluhan, dan sarana prasarana yang dimiliki.

**Kata Kunci: Inovasi, Pengolahan Sampah, Pemerintah Daerah.**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out innovations and barriers to innovation in waste management by the Environmental Service in Tualang District, Siak Regency. This type of research is quantitative with a descriptive approach. The research population is the employees of the Environmental Service of Siak Regency and the Community of Tualang District. Sampling was done by using purposive sampling technique, so that the sample of this study was set at 51 people. Data were collected by means of observation, distributing questionnaires, and documentation. All data that has been obtained in the study are grouped and processed quantitatively. The data are presented and explained and analyzed descriptively in order to obtain research results, then conclusions can be drawn. Overall, innovation in waste management by the Environmental Service in Tualang District, Siak Regency is in the fairly implemented category. The Environmental Service in Tualang District, Siak Regency has made innovations that have been running for more than 2 years, there is a novelty and uniqueness in waste management by cooperating with the community, involving the role of the community and*

*stakeholders, and activities financed by the Regional Budget of Siak Regency, then having an impact or benefits for the region and society. Thus, waste management innovation is in the category of quite implemented. There are several obstacles to waste management innovation in Tualang District, namely the level of population distribution, participation, guidance, counseling, and infrastructure.*

**Keywords: Innovation, Waste Management, Local Government.**

## **PENDAHULUAN**

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, mengakibatkan semakin banyak timbunan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan merupakan benda yang dapat merusak lingkungan hidup. Pengelolaan sampah sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup, karena sampah dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Keberadaan sampah dapat menyebabkan pencemaran atau polusi, yaitu polusi tanah, polusi udara, maupun polusi air.

Tanah akan dicemari oleh sampah yang tidak dapat terurai atau sampah-sampah yang sulit diurai oleh organisme-organisme dalam tanah, sehingga tanah menjadi kotor, penyerapan air menjadi terganggu, atau dapat menimbulkan genangan air di berbagai tempat yang akhirnya menjadi sarang bagi nyamuk berbahaya, seperti nyamuk demam berdarah dan nyamuk malaria.

Udara yang dicemari oleh sampah diketahui dari aroma bau yang ditimbulkan, bau yang ditimbulkan pertanda terjadinya pembusukan, di mana pembusukan yang terjadi akibat adanya organisme tertentu dan kelembaban tanah akibat tertimbun sampah. Kondisi tanah yang lembab tersebut menjadi tempat berkembangnya berbagai bibit kuman atau virus yang akhirnya menjadi potensi berbagai penyakit.

Air yang dicemari oleh sampah diketahui dari adanya sampah-sampah yang dibuang ke perairan seperti sungai, kanal, atau drainase-drainase, sehingga air menjadi kotor dan alirannya terganggu. Sampah yang selalu di buang ke drainase menyebabkan tersumbatnya aliran air, dan dapat menyebabkan banjir. Banjir yang terjadi kemudian mengenai manusia, di mana airnya dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit, maupun berbagai penyakit pencernaan akibat kuman yang dibawa oleh air.

Saat ini sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju, sampah selalu menjadi masalah yang ada di lingkungan. Di Indonesia sampah yang dihasilkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dan proses alam sampai saat ini belum terkelola dengan baik, sehingga sampah menumpuk di mana-mana dan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut di perlukan *Innovative Governance* atau pemerintahan yang inovatif dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah ini secara optimal. *Innovative Governance* atau pemerintahan inovatif, merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau bisa juga dikatakan sebagai Inovasi Daerah. Inovasi Daerah merupakan semua bentuk

pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Santoso (2016), Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada mendefinisikan pemerintahan inovatif adalah pemerintahan yang mengondisikan, memfasilitasi dan meregulerkan praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem itu, ada elemen pemerintah dan ada juga elemen masyarakat/rakyat/warga negara. Lebih dari itu, sistem digerakkan oleh interaksi antara keduanya. Dengan kata lain, inovasi ini mempertaruhkan kecerdasan atau kreativitas, hanya saja kecerdasan dan kreativitas ini adalah wataknya sistem pemerintahan, bukan sekedar wataknya pimpinan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam *Innovative Governance Award* Tahun 2017 menetapkan ada 5 indikator pemerintah inovatif, yakni :

1. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun,
2. Memiliki kebaruan dan keunikan,
3. Melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder*,
4. Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah dan
5. Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah indikator pemerintahan inovatif ada 8 yaitu, peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas layanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam melakukan inovasi pengelolaan sampah yaitu dengan cara *Ecobrick*. *Ecobrick* merupakan salah satu upaya kreatif untuk mengelola sampah plastik menjadi benda-benda yang berguna, mengurangi pencemaran dan racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik. *Ecobrick* adalah salah satu usaha kreatif bagi penanganan sampah plastik. Fungsinya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia plastik-plastik tersebut dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa dipergunakan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Pembuatan *ecobrick* masih belum begitu populer di kalangan masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat masih memperlakukan plastik-plastik bekas sebagai sampah plastik rumah tangga, mengotori lingkungan, sungai dan mencemari kehidupan sehari-hari tanpa adanya kesadaran diri. bagaimana kita perlu mengubah gaya hidup kita dan perilaku konsumsi kita, dan apa yang bisa kita lakukan dengan plastik atau sampah yang digunakan dan bahkan membuat mereka sebagai bagian dari solusi.

Dalam menjawab permasalahan sampah, pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan sampah. Dalam menjalankan kebijakan publik ini sangat di perlukan peran dari masyarakat, karena pengelolaan sampah tidak akan optimal jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, Penyelenggaraan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung

jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut dimaksudkan sebagai berikut:

Asas “tanggung jawab” adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat serta menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Kabupaten Siak saat ini terdiri dari 14 kecamatan yang tersebar di seluruh kawasan dengan total luas 8.556,09 Km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas disandang Kerinci Kanan dengan luas wilayah 1.705,00 Km<sup>2</sup> atau 19,93% dari total luas Kabupaten Siak, sedangkan Kecamatan Sabak Auh menjadi kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 73,38 Km<sup>2</sup> atau 0,86% dari total luas Kabupaten Siak. Saat ini Kabupaten Siak dihuni sebanyak 457.940 jiwa yang terdiri dari 236.494 laki-laki dan 221.446 perempuan dengan tingkat kepadatan rata-rata 51 orang perKm<sup>2</sup>.

**Tabel I.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk	
		Km <sup>2</sup>	Persentase	Jumlah	Kepadatan
1	Minas	346,35	4,05	28.948	80
2	Sungai Mandau	1.493,65	17,46	9.128	6
3	Kandis	894,17	10,45	74.727	77
4	Siak	1.346,33	15,74	31.144	22
5	Kerinci Kanan	1.705,00	19,93	23.783	13
6	Tualang	128,66	1,50	120.655	879
7	Dayun	155,09	1,81	30.959	193
8	Lubuk Dalam	343,60	4,02	19.905	56
9	Koto Gasib	704,70	8,24	23.469	32
10	Mempura	232,24	2,71	16.951	69
11	Sungai Apit	151,00	1,76	30.997	196
12	Bunga Raya	437,45	5,11	26.777	59
13	Sabak Auh	73,38	0,86	12.911	172
14	Pusako	544,47	6,36	7.586	14
Jumlah		8,556,09	100	457.940	51

Sumber: BPS Kabupaten Siak, 2020.

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Siak untuk penanganan sampah langsung ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan setiap Kecamatan masing-masing memiliki pengawas kebersihan.

Dari permasalahan yang ada di atas tidak terlepasnya dari peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam menangani permasalahan sampah yang ada. Sementara dilihat dari hasil jumlah penduduk Kecamatan Tualang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang**

No	Kampung	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1	Maredan	3.426	847
2	Tualang	15.724	3.171
3	Pinang Sebatang	4.656	2.330
4	Maredan Barat	2.814	803
5	Pinang Sebatang Barat	5.237	1.516
6	Pinang Sebatang Timur	9.413	2.984
7	Perawang Barat	23.246	4.759
8	Perawang	43.843	11.957
9	Tualang Timur	5.825	1.559
	Total	114.194	30.036

Sumber : Kantor Kecamatan Tualang Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat terlihat jumlah penduduk Kecamatan Tualang cukup banyak. Hal ini juga berimbas dengan jumlah sampah yang ikut meningkat, padahal lahan TPA di Kabupaten Siak tidak ikut bertambah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak untuk mengukur jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat, Kecamatan Tualang memakai asumsi karena belum memiliki alat ukur yang pasti. Asumsi tersebut memperkirakan bahwa satu orang penduduk menghasilkan 2,5 Liter Sampah Setiap harinya.

Kecamatan Tualang terdiri dari 9 (Sembilan) Kampung yang masih dalam tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi kinerjanya, yang mana alat pengangkutan sampah yang digunakan harus bergiliran dengan beberapa Kampung dalam satu kecamatan. Seperti di Kecamatan Tualang yang hanya di fasilitasi sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tualang**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah yang disediakan	Keterangan Kondisi
1	Pick up	2 Unit	Cukup Baik
2	Gerobak Sampah	2 Buah	Baik
3	Tong Sampah	20 Buah	Cukup Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2020

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan di atas, peneliti menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu :

1. Telah adanya inovasi *ecobrick* dalam pengelolaan sampah yang dilakukan

pemerintah Kabupaten Siak. Namun inovasi ini belum diterapkan di Kecamatan Tualang.

2. Telah ada inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dengan membuat Bank Sampah yang

bekerjasama dengan kelompok masyarakat di sekitar tempat penampungan akhir sampah. Adanya penghargaan yang diterima Kecamatan Tualang dalam inovasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Namun inovasi ini masih terbatas hanya berada di Kelurahan Perawang, sementara di desa/kelurahan lain belum berkembang

3. Terindikasi belum adanya penyuluhan dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat di Kecamatan Tualang mengenai inovasi pengelolaan sampah, sehingga hanya ada 1 buah Bank Sampah yang terkelola.
4. Luasnya wilayah dan menyebarkan penduduk menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang.
5. Terindikasi masih kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah dan tempat penampungan sampah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temukan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah berupa Proposal dengan judul: **“Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

## STUDI KEPUSTAKAAN

### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafie (2007;15) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010;6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (dalam Syafie, 2005;21).

Sedangkan menurut Ndraha (2003;5) pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

### 2. Konsep Manajemen Lingkungan

Menurut Handoko (2000), lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur yang berasal dari luar organisasi, di mana unsur-unsur ini sulit untuk dikendalikan dan diketahui lebih awal oleh manajer. Komponen yang termasuk ke dalam

lingkungan eksternal adalah segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitar organisasi, termasuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, dan pihak yang mewakilinya (pemerintah, pelanggan, investor/pemilik). Aktivitas yang terkait yaitu komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan pembuangan limbah ke saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik dan lain-lain.

Nilasari dan Wiludjeng (2006) menjelaskan bahwa lingkungan eksternal dibagi menjadi dua yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen, sedangkan lingkungan eksternal makro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung, seperti kondisi perekonomian, perubahan teknologi, politik, sosial dan lain-lain.

#### A. Orientasi Kebijakan Manajemen Lingkungan

Manajemen lingkungan menurut orientasi kebijakannya secara umum dapat dibagi dua, yaitu (Marcus & Willig, 1997):

- a. Berorientasi pemenuhan (*regulation compliance*).
- b. Berorientasi setelah pemenuhan (*beyond compliance*).

Menurut Purwanto (2004), kebijakan manajemen lingkungan berorientasi pemenuhan merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan di perusahaan. Kebijakan ini berasal dari pemikiran bahwa akibat yang ditimbulkan aktivitas perusahaan tidak boleh sampai merugikan keberlangsungan bisnis perusahaan, caranya dengan menaati peraturan pemerintah semaksimal mungkin untuk menghindari penalti/denda lingkungan, klaim dari

masyarakat sekitar dan lain-lain, contohnya dengan memakai metode reaktif, ad-hoc, dan pendekatan end-of-pipe (menanggulangi masalah polusi dan limbah pada hasil akhirnya, seperti lewat penyaring udara, teknologi pengolah air limbah dan lain-lain). Sedangkan kebijakan manajemen lingkungan berorientasi setelah pemenuhan berangkat dari pemikiran bahwa cara tradisional menangani isu lingkungan – dalam cara reaktif, adhoc, pendekatan end-of-pipe- telah terbukti tidak efisien.

### 3. Konsep Lingkungan Hidup

Menurut Rangkuti (2000:171) mengatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di lihat dari sudut pandang bentuk dan isinya, di imbangi keharusan bagi pemerintah untuk mengaksikan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong di tingkatannya upaya melestarikan lingkungan.

Wewenang pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika.
3. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan

hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Konsep Ekologi Pemerintahan**

Menurut edwar S. Rogers dalam bukunya *human ecology and health, an introduction for administration*. Hang diterbitkan Mac Millan, New york disebutkan bahwa: “*Ecology is the studi of the relations between organism and their emvironment*” ekologi adalah pelajaran tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka.

Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.

Dalam Ekologi Pemerintahan, ada dua macam Ekosistem yaitu :

##### **1. Ekosistem/lingkungan Fisik**

Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan Fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok yaitu : kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam.

##### **2. Ekosistem/lingkungan sosial atau geografis**

Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia.

Ada 4 prinsip dasar Ekologi Pemerintahan menurut Amsyari, yaitu :

- a. Setiap masalah akan menimbulkan stimulus negatif terhadap sistem yang akan menghancurkan eksistensi manusia.

- b. Perlunya tindakan adaptasi yang menyeluruh dan mengarah kepada suatu perbaikan ekosistem agar menjadi lebih stabil dan harmonis.
- c. Serta bebas dari ancaman stimulus negatif yang sama untuk di masa yang akan datang. Apabila tindakan adaptasi yang dilakukan merupakan satu stimulus negatif yang baru bagi organisme lain, maka segala usaha harus mendahulukan kepentingan populasi manusianya dibanding kepentingan populasi lainnya.
- d. Tindakan adaptasi apapun yang dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatan yang sebesar mungkin untuk kepentingan eksistensi manusia

#### **5. Konsep Inovasi**

Menurut Yogi dalam LAN (2007:115), inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers dalam LAN (2007:115) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif  
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai

kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2. Kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. Kemungkinan Dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya. Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, sehingga perkembangannya dapat dipelajari dan mudah diperoleh informasinya.

## 6. Konsep Inovasi Pemerintahan

Selain itu hasil benchmarking teoritis dari Global Innovation Index dan Government Innovation Index di Korea Selatan (LAN, 2016 : 42) bahwa pemerintah bisa dikatakan inovatif merupakan pemerintah yang memiliki input 10 indikator pemerintah inovatif dan 20 indikator output. Adapun 10 indikator tersebut yaitu visi inovasi, komitmen perubahan, reward bagi inovator, kebijakan pendorong inovasi, kapasitas sumber daya manusia inovasi, kepedulian sumber daya manusia terhadap inovasi, pengembangan sumber daya inovasi, dukungan anggaran, optimalisasi CSR dalam mendukung inovasi, dan penggunaan IT (teknologi informasi) dalam sistem kerja.

Sedangkan 20 indikator dalam output pemerintahan inovatif yaitu terdiri dari jumlah inovasi yang dihasilkan, jenis inovasi yang dihasilkan, kualitas inovasi, pedoman teknis operasional inovasi pemda, pelembagaan inovasi, ketersediaan sistem informasi layanan publik, penyelesaian layanan pengaduan, tingkat capaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM), peningkatan jumlah perijinan, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan lapangan kerja, peningkatan investasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan PAD, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tingkat partisipasi

stakeholders, opini BPK terhadap laporan keuangan, nilai capaian LAKIP, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan nilai IPM.

## 7. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim dan Yenny, 2002:534).

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif yang mana penelitian ini menuntut peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya dan wawancara, penafsiran terhadap data dengan menggunakan angka tersebut serta penampilan dari hasilnya dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk menjelaskan isi dari tabel tersebut penulis menggunakan penjelasan data tipe Deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan mengenai bidang tertentu, (Azwar,2010;7).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Inovasi merupakan langkah-langkah baru atau kombinasi cara lama dan cara baru untuk menangani masalah permasalahan,

sehingga sampah-sampah yang ada mampu dikelola dengan baik dan bisa memberi dampak positif bila dikelola dengan baik. Untuk itu inovasi atas pengelolaan sampah sangat penting untuk diwujudkan, agar beragam permasalahan yang ditimbulkan akibat sampah dapat di atasi.

Pada penelitian ini inovasi dalam pengelolaan sampah dilihat dalam beberapa indikator, masing-masing indikator dijelaskan secara terpisah sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian dari masing-masing indikator maupun secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun

Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Di mana acuan inovasi minimal telah berjalan 2 dilihat dari adanya program pengelolaan sampah dan program tersebut sudah berjalan selama dua tahun.

#### b. Memiliki kebaruan dan keunikan

Memiliki kebaruan dan keunikan merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Di mana indikator ini diukur melalui membuat inovasi pengelolaan sampah dan inovasi yang dibuat memiliki keunikan dan kebaruan.

#### c. Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder

Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Di mana indikator ini ditetapkan dengan memberikan pertanyaan tentang melibatkan masyarakat atau

stakeholder dalam pengelolaan sampah dan menerima saran masukan dari masyarakat atau stakeholder.

#### **d. Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah**

Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi.

#### **e. Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat**

Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Indikator ini ditetapkan dengan pengukuran dari pertanyaan tentang berorientasikan kepada kepentingan umum dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat dalam melakukan langkah inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dan adanya transparansi atau terbukanya sistem penganggaran pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan apa yang dikerjakan dalam pengelolaan sampah diketahui masyarakat semisalnya perwakilan dari masyarakat yakni DPRD. Dengan demikian dari dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian dari seluruh indikator yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dikumpulkan pada satu tabel rekapitulasi untuk dapat ditarik satu

kesimpulan atas penelitian yang dilaksanakan.

Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada pada kategori cukup terlaksana. Di mana sebagian besar responden mengatakan terlaksana sejumlah 29 orang, mengatakan cukup terlaksana 14 orang, dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 7 orang. Di mana hasil dari penelitian yang diperoleh sebesar 58%, sehingga dari teknik pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya dikatakan berada pada kategori cukup baik.

Hasil ini memberikan penjelasan bahwa inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan melakukan inovasi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun, adanya kebaruan dan keunikan dalam pengelolaan sampah dengan cara menggandeng masyarakat, melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dan kegiatan dibiayai oleh APBD dari Kabupaten Siak, kemudian memberi dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat.

## **2. Hambatan/kendala Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan persampahan, yaitu:

- Tingkat penyebaran penduduk di Kecamatan Tualang yang tidak merata, sehingga pengelolaan sampah menjadi kurang efektif. Di mana dari 9 desa/kelurahan yang

berdampak dari inovasi pengelolaan sampah hanya 1 kelurahan yakni Kelurahan Perawang. Sementara untuk beberapa desa/kelurahan lainnya belum tersentuh sepenuhnya dalam inovasi pengelolaan sampah.

- Belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan, sehingga berbagai jenis inovasi yang telah dibentuk pemerintah belum berjalan maksimal seperti inovasi pembuatan Bank Sampah yang hanya berjalan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, sementara di desa/kelurahan lainnya belum berjalan. Belum adanya pelaksanaan inovasi pengelolaan sampah yang mengadopsi kategori ecobrick, sehingga inovasi pengelolaan sampah masih sebatas pada Bank Sampah.
- Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan dalam menyadarkan masyarakat mengenai persampahan baik dampak negatif maupun positifnya. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang turut terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga partisipasi masyarakat untuk mendukung inovasi pengelolaan sampah masih sangat sedikit jumlahnya.
- Pengelola sampah yang belum mencantumkan penyuluhan dalam programnya, sehingga program-program penyuluhan dalam pengelolaan persampahan belum berjalan di tengah-tengah masyarakat.

- Kekhawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai dengan konsep pengelolaan yang ada.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada pada kategori cukup terlaksana. Hasil ini dijelaskan bahwa:

1. Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan melakukan inovasi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun, adanya kebaruan dan keunikan dalam pengelolaan sampah dengan cara menggandeng masyarakat, melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dan kegiatan dibiayai oleh APBD dari Kabupaten Siak, kemudian memberi dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan demikian inovasi pengelolaan sampah berada pada kategori cukup terlaksana.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang yakni tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata, partisipasi masyarakat yang belum berjalan dengan baik, pembinaan yang belum terprogram, penyuluhan yang belum berjalan, dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas, serta fasilitas penampungan sampah di lingkungan masyarakat yang masih terbatas.

### **Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah hendaknya mengalokasikan anggaran untuk inovasi pengelolaan sampah yang memadai, sehingga Dinas Lingkungan Hidup bisa menjalankan berbagai program inovasi dalam mengelola sampah untuk menuju siak hijau.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup hendaknya membuat program inovasi pengelolaan sampah yang berkesinambungan dan terukur, sehingga berbagai inovasi pengelolaan sampah dapat dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Siak. Inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan ekosistemnya akibat sampah yang tidak terkelola. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup hendaknya lebih aktif dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan sampah menjadi bermanfaat dan bernilai jual.
3. Bagi UPTD Persampahan di Kecamatan Tualang hendaknya mengajukan atau usulan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dalam menjangkau pengelolaan sampah di seluruh kawasan Kecamatan Tualang. Kemudian hendaknya meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam turut serta menginovasi pengelolaan sampah yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Awang, Azam & wijaya Mendara, 2012.  
*Ekologi Pemerintahan,*  
Pekanbaru,Alaf Riau.

- LAN. 2016. *Penyusunan Model Pengukuran Index Inovasi Pemerintah Daerah.* Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara : Jakarta
- Ndraha, Talizuduhu.2003.*Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru).*Jakarta,Rineka Cipta.
- Ndraha, Talizuduhu. 1997. *metodologi ilmu pemerintahan,* rineka cipta. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Bandung, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_,2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung, Refika Aditama.

### **Dokumentasi:**

- Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 9 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah